

JERAT DEMOKRASI DAN TUNTUTAN KEMAJEMUKAN
(Refleksi atas Hari Pers Nasional)

Oleh



Yoseph Andreas Gual
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fisip Unwira Kupang

Hari Pers Nasional, 9 Februari yang diperingati secara nasional di Palembang-Sumatera Selatan ditandai dengan pengratifikasian standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik dan standar perlindungan wartawan oleh perusahaan pers (Kompas,28/01/2010).

Ratifikasi keempat hal penting sehubungan dengan kehidupan pers nasional ini memberikan implikasi besar bagi kehidupan bangsa. Paling kurang ada tiga komponen dalam masyarakat yang akan menikmati pemberlakuan standarisasi-standarisasi tersebut. Kelompok *pertama* yang akan dipengaruhi oleh pemberlakuan standarisasi-standarisasi ini adalah perusahaan pers itu sendiri. Dengan standarisasi yang ada akan terlihat perusahaan pers mana yang mengelola perusahaannya secara profesional, mana yang mengarah ke profesionalisme dan mana yang sulit untuk mengikuti jejak langkah ini. Mereka yang mengikuti semua standarisasi ini adalah perusahaan pers yang sudah atau mengarah pada keamanan. Sementara perusahaan pers yang pas-pasan akan sulit mengejar standar-standar tersebut. Implikasinya akan kelihatan pada kelompok *kedua*, yakni pekerja media.

Tidak semua pekerja media akan merasakan indahnya pemberlakuan standarisasi ini. Para pekerja media yang berada di bawah perusahaan pers mapan pasti akan menikmati keuntungan tersebut namun para pekerja media yang berada di bawah perusahaan pers yang bermodal pas-pasan masih sulit untuk meraihnya. Tentu saja hal ini berhubungan dengan tingkat pendapatan pekerja media dan peningkatan kemampuan kewartawanan sang jurnalis seperti mendapatkan kesempatan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang disediakan oleh perusahaan media bagi para jurnalisnya. Dengan pemberlakuan standarisasi ini tingkat pendapatan jurnalis meningkat dan keterampilan kewartawanan mereka semakin terasah yang pada gilirannya diharapkan sang jurnalis dapat bekerja secara profesional. Dua hal ini merupakan usaha memperkecil pelacuran dunia kewartawanan oleh para jurnalis sendiri dengan menggunakan kekuatan tinta mereka untuk menekan dan memeras nara sumber.

Ketiga, kelompok lain yang diuntungkan dengan pemberlakuan standarisasi jurnalistik adalah masyarakat umum. Dengan standarisasi yang semakin tinggi, kehidupan pers nasional akan semakin profesional. Profesionalisme ini tentu saja akan kelihatan dari isu yang diangkat, cara memberitakannya dan sumber yang dipakai. Isu pemberitaan haruslah yang berhubungan dan demi kepentingan

masyarakat banyak. Isu tersebut harus dikemas secara menarik sekaligus berbobot agar dapat menarik minat dan mencerdaskan masyarakat. Sementara sumbernya harus berimbang (cover both sides/all). Dengan kata lain masyarakat akan mendapatkan berita yang aktual, faktual, objektif, jelas, berimbang, benar, menarik dan akurat. Inilah inti dari profesionalisme pers. Ujung dari profesionalisme jurnalistik adalah pers secara konsisten menjalankan fungsi edukasi, informasi, hiburan dan kontrol social dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini pada gilirannya akan membantu masyarakat melakukan transformasi diri baik secara individual maupun sosial. Transformasi tersebut diharapkan terarah pada perubahan sosial yang makin cerdas, maju, baik, adil, benar dan damai.

Standarisasi yang baru saja diberlakukan sebenarnya merupakan konsekwensi logis ketika media berada dalam lingkungan negara demokratis. Pers harus bebas dan kebebasan pers itu harus dipergunakan semaksimal mungkin demi kemaslahatan/kesejahteraan semua anak bangsa. Dan untuk sampai ke sana, pers harus menggunakan standarisasi yang tinggi dan berkualitas agar tugas tersebut menghasilkan sesuatu yang berkualitas karena dituntun oleh pedoman yang bermutu pula.

Jeratan Demokrasi

Kita beranggapan bahwa di era demokrasi seperti sekarang pers kita telah bebas. Tetapi pertanyaannya adalah bebas dari siapa? Jika dari negara jawabannya ya. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pers semakin bebas. Indikasinya, secara kuantitas media tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Sementara secara kualitas, isi tulisan media lebih mendalam, bervariasi dan berani mengungkapkan segala macam kebobrokan yang ada dalam masyarakat yang pada masa sebelumnya hanya merupakan utopia belaka.

Kebebasan pers dari penguasa di era otoritarian semacam Orde Baru lalu tidak lagi relevan jika dikaitkan dengan era reformasi yang demokratis seperti sekarang. Dalam atmosfer demokrasi, kebebasan pers tidak bisa dilihat secara diadik antara negara dan pers. Dalam dunia demokrasi kebebasan pers berada dalam hubungan triadik antara negara, pasar dan pers itu sendiri. Tekanan terhadap kebebasan pers sudah bergeser dari negara/penguasa ke tangan pasar/bisnis. Dengan kata lain, dunia demokrasi sebenarnya juga sedang menyediakan jerat mematikan bagi kebebasan pers.

Karena itu konsep kebebasan pers haruslah diredifinisikan agar kita tidak terperangkap dalam jerat demokrasi yang melumpuhkan pers. Kebebasan pers versi baru itu haruslah; *pertama*, kebebasan pers tidak hanya mencakup kebebasan media dan para jurnalis dari tekanan penguasa tetapi juga terutama harus bebas dari tekanan pasar. *Kedua*, para jurnalis harus bebas mempraktekkan kaidah-kaidah dan etika profesi jurnalis yang baru saja diratifikasi dari tekanan kepentingan ekonomi-politik pemilik modal media yang bersangkutan. *Ketiga*, yang paling substansial adalah bahwa kebebasan pers harus selalu dikaitkan dengan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi pentransformasian diri. Selain itu, masyarakat pun harus mendapatkan peluang yang sama dan terbuka di berbagai media untuk berekspresi dan berpartisipasi secara demokratis sehubungan dengan masalah-masalah kehidupan bersama.

Tuntutan Kemajemukan

Penanda yang paling jelas dalam implementasi kebebasan di negara demokratis adalah membiarkan, menghormati dan memelihara kemajemukan yang merupakan hal hakiki dalam kehidupan bermasyarakat. Keindonesiaan kita adalah kemajemukan itu sendiri. Pertanyaan sekaligus tantangan

bagi pers sekarang adalah bagaimana ia dapat melayani masyarakat yang majemuk semacam ini agar di satu sisi kepentingan idil dapat tercapai di lain sisi kepentingan bisnisnya pun tidak terbelengkhai?

Jawabannya adalah dengan menjunjung tinggi nilai profesionalisme jurnalistik yakni pers harus netral. Keberpihakan media hanya satu yakni membela kebenaran dan keadilan yang biasanya tercemar oleh berbagai kepentingan. Itu berarti pers selalu memiliki peluang berada di belakang kelompok mana pun yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya? Sederhana saja. Dengan melihat dan merefleksikan bahwa tujuan utama sebuah kepentingan adalah memberikan efek baik, damai, adil dan sejahtera bagi masyarakat banyak dan bukan hanya untuk segelintir orang/kelompok. Di sanalah media harus berada dan memihak.

Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, setiap orang/kelompok memiliki kepentingannya masing-masing dan berupaya agar kepentingan mereka dapat tercapai. Mereka dapat menggunakan segala cara untuk mendapatkannya termasuk menggunakan media. Namun kelompok-kelompok kepentingan tersebut akan lebih bersimpatik dan memilih media yang cenderung netral tanpa berpihak pada kelompok mana pun. Mereka lebih menginginkan ruang publik semacam pers menjadi tempat netral di mana semua kepentingan dapat masuk dan menggunakannya secara bebas-leluasa ketimbang media mengeksklusifkan diri mendukung kelompok tertentu.

Kecenderungan mendukung pihak tertentu oleh media membangkitkan antipati terhadap media bersangkutan. hal ini tidak menguntungkan media sebab secara idil media tidak memberikan rasa nyaman bagi seluruh komponen masyarakat dan secara bisnis media tersebut kehilangan sebagian konsumennya. Tetapi jika media berperan netral dengan melayani semua masyarakat guna mencapai kebenaran dan keadilan maka media tersebut akan diterima oleh semua kelompok kepentingan. Di sini media diuntungkan secara idil sekaligus secara bisnis. Inilah tuntutan masyarakat majemuk bagi pers di negara demokrasi.